

JEJARING KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DI KABUPATEN BANDUNG

Policy Network in Housing Development for Low-Income Communities in Bandung Regency

Muhammad Jodi Sanjaya¹, Budiman Rusli², Ida Widianingsih³

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
jodisanjaya30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan mengenai Jejaring Kebijakan dalam Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan penyediaan hunian yang layak bagi MBR di Kabupaten Bandung yang melibatkan berbagai aktor multisektor seperti dari pemerintah, pengembang perumahan swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dimensi jejaring kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992) yang mencakup aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung belum memenuhi dimensi-dimensi jejaring kebijakan, diantaranya yaitu peran dari masyarakat sendiri belum terlibat secara langsung dan cenderung kurang aktif karena saat ini aspirasi dan keluhan masyarakat hanya disampaikan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tidak adanya mekanisme kerja yang dibangun dalam jejaring kebijakan, tidak adanya jadwal pertemuan secara rutin yang dilakukan antar aktor sehingga koordinasi yang dilakukan lebih sering melalui *Whatsapp Group* saja, dan para aktor kebijakan kurang memaksimalkan saluran informasi yang ada saat ini.

Kata Kunci : Jejaring Kebijakan, Aktor, MBR, Perumahan, Koordinasi

ABSTRACT

This research describes the policy network in housing policy for low-income communities in Bandung Regency. This research is motivated by the author's interest in housing policy for low-income communities in Bandung Regency which involving various actors such as the government, business, academics, society, and mass media. This study uses the theory of dimensions of policy network from Frans Van Waarden (1992) which includes actors, functions, structures, institutionalization, rules of action, power relation, and actor strategies. The method used is a descriptive method that uses a qualitative research approach. Data obtained through literature studies and field studies (observation and interviews). The technique for determining informants is using purposive sampling technique.

The results of this research indicate that the policy network in housing development for low-income communities in Bandung Regency has not met most of the dimensions of policy network, i.e. the role of the community itself has not been directly involved and tend to be less active because they used to lean and represented by Non-Governmental Organizations (NGOs), there has not yet a working mechanism built in the policy network, also there has not yet scheduled regular meetings between actors so that coordination mostly done through Whatsapp Group, and the actors has not maximize the existing information channel.

Keywords : Policy Network, Actor, Low-Income Communities, Housing, Coordination

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk dalam hal ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selanjutnya, aturan mengenai perumahan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana setiap individu memiliki hak untuk hidup yang layak, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Infrastruktur rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan primer setiap keluarga.

Masalah perumahan di Indonesia berakar dari pergeseran konsentrasi penduduk dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk kota di Indonesia yang cukup tinggi, sekitar 4% pertahun, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, dan cenderung akan terus meningkat. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang tinggi tumbuhnya kota-kota di Indonesia. Sayangnya, terjadi keadaan yang tidak sesuai antara tingkat kemampuan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk lapangan kerja yang ada di perkotaan, mengakibatkan timbulnya kelas sosial yang tingkat ekonominya sangat rendah. Hal ini berakibat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kaum papa itu yang dapat dikatakan sangat minim. Rumah dan tempat hunian mereka tidak lebih merupakan tempat untuk tetap bertahan hidup di tengah kehidupan kota. Kualitas permukiman mereka dianggap rendah dan tidak memenuhi standar hidup yang layak.

Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di wilayah Metropolitan Bandung Raya, diproyeksikan pada tahun 2024 membutuhkan 1.050.000 unit rumah, sedangkan ketersediaan rumah pada tahun 2014 baru mencapai 706.651 unit. Berdasarkan analisa kebutuhan dan penanganan perumahan kawasan permukiman, angka *backlog* rumah mencapai 343.349 unit. Angka *backlog* rumah yang tinggi merupakan indikator permasalahan awal perumahan dan permukiman yang menjadi dasar dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan penanganannya secara lebih teknis.

Dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, yakni pemerintah. Namun, harus diselesaikan dengan membagi bersama urusan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan pelaku lainnya (*stakeholders*). Serta perlu adanya perencanaan dan partisipasi terpadu yang melibatkan berbagai *stakeholders* dari semua tingkatan pemerintahan, pelaku bisnis, akademisi, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan media dan menempatkan komunitas lokal sebagai subjek pengembangan. Adanya partisipasi *stakeholders* atau aktor-aktor dalam pembangunan perumahan telah mendorong terbentuknya jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat, dan termasuk swasta (Warden, 1992).

Melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, membentuk Pokja PKP yang mengurus penyediaan perumahan bagi MBR. Pokja tersebut terdiri dari unsur praktisi, pmda, perbankan dan pengembang perumahan swasta. Fungsi Pokja di tingkat kabupaten yaitu melakukan koordinasi program, advokasi SKPD dan *stakeholders* kabupaten/kota, serta melakukan advokasi yaitu memberi input strategis dalam perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota. Selain dari pihak pemerintah daerah, pihak swasta juga turut terlibat dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung. Salah satunya yaitu Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Dari pihak masyarakat sipil, diwakilkan oleh LSM Asosiasi Konsultan Pembangunan Permukiman Indonesia (AKPPI). Keterlibatan media massa juga penting dalam sebuah jejaring kebijakan, media massa yang ikut terlibat di Kabupaten Bandung salah satunya adalah Galamedia.

Jejaring yang terbentuk dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung memang terdiri atas kumpulan aktor yang heterogen namun tidak terintegrasi. Padahal suatu jejaring kebijakan yang efektif dan inovatif terdiri atas kumpulan aktor yang heterogen yang terintegrasi secara sentral dan padat (Sandstrom & Carlsson, 2008). Tidak ada kohesivitas atau keeratan

hubungan diantaranya, hal ini terlihat dari minimnya komunikasi diluar forum rapat lintas sektoral dan tidak adanya inisiatif aktor yang lain untuk saling berkomunikasi dalam rangka proses pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung.. Adapun indikasi masalah mengenai jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: (1) Belum terpadunya kelembagaan antar pemangku kepentingan dalam kebijakan. Sistem perencanaan masih bersifat parsial dan tidak tersinkronisasi, (2) Mekanisme kerja dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung belum terbangun, dan (3) Komunikasi yang terjalin antar aktor kebijakan atau pemerintah dengan masyarakat belum maksimal, hal tersebut karena belum adanya jadwal pertemuan secara rutin dan pelibatan masyarakat lebih sering diwakilkan oleh pihak LSM saja. Dengan melihat berbagai indikasi masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Jejaring Kebijakan dalam Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bandung”**. Dengan pertanyaan penelitian **“Bagaimana pelaksanaan jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung?”**.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, bahwasanya jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung sudah berjalan namun belum optimal, karena masih ditemukan berbagai indikasi masalah. Untuk dapat mengoptimalkan kinerja antar aktor kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR, maka perlu memperhatikan tujuh dimensi jejaring kebijakan yang dikemukakan oleh Frans Van Waarden, yaitu: aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai upaya penulis untuk mengeksplorasi lebih mendalam dari partisipan terkait serta penulis ingin memahami lebih mendalam terkait

fenomena yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang mana pertimbangan tersebut adalah memilih sampel berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan terkait objek yang diteliti (Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung. Adapun hasil penelitian yang telah didapatkan melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan, yaitu sebagai berikut:

A. Aktor

Aktor dalam jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung terbentuk dari akademisi, pelaku bisnis, LSM, pemerintah, dan media massa. Aktor dari pemerintah daerah yaitu, Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Disperkimtan, Dinas PUTR, DLH, Dinsos, Dinas Koperasi, Bappeda, dan Setda Kabupaten Bandung. Aktor dari LSM yaitu, Asosiasi Konsultan Pembangunan Permukiman Indonesia (AKPPI), sementara itu aktor dari pelaku bisnis terdapat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Barat. Aktor dari akademisi yaitu, Universitas Telkom, Universitas Nurtanio Bandung, Universitas Bale Bandung, Unpad, ITB, dan ITENAS. Dilihat dari keanggotaan tersebut maka, jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung membentuk model *pentahelix* dimana terdapat lima aktor yang terlibat.

B. Fungsi

Bagian kedua dalam dimensi jejaring adalah fungsi. Fungsi aktor adalah apa yang dilakukan aktor tersebut dalam jejaring kebijakan. Fungsi aktor dan jejaring ini sesuai pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 4. 1 Fungsi Aktor

Aktor	Akses dalam Pengambilan Keputusan	Pertukaran Informasi	Pertukaran Sumber Daya	Kerja Sama
Pemerintah daerah	Pembuat dan pelaksana kebijakan	Dua arah	Penyediaan anggaran, otoritas, dan pertimbangan hukum	Ada
LSM	Pembuat kebijakan	Dua arah	Menyediakan informasi, skill (inovasi kebijakan)	Ada
Organisasi Pengembang Perumahan	Pembuat kebijakan	Dua arah	Menyediakan informasi, data (jumlah kuota rumah MBR, jumlah MBR), skill (inovasi kebijakan)	Ada
Akademisi	Pembuat kebijakan	Dua arah	Memberikan konsep, teori-teori, dan informasi yang relevan dan terbaru	Ada
Media Massa	Tidak ada	Dua arah	Menyebarkan informasi	Ada

Sumber: Penulis, 2019

C. Struktur

Struktur merupakan bagian terpenting dalam jejaring karena dapat menjelaskan situasi dari jejaring kebijakan. Struktur jejaring pada kebijakan

pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Struktur Jejaring Kebijakan

Aktor	Ukuran Jejaring	Jenis Keanggotaan	Jenis Koordinasi	Kondisi Hubungan
Pemerintah Daerah	Banyak	Wajib	Konsultatif	Kooperatif
LSM	Sedikit	Sukarela	Konsultatif	Kooperatif
Swasta	Sedikit	Sukarela	Konsultatif	Kooperatif
Akademisi	Sedikit	Sukarela	Konsultatif	Kooperatif
Media Massa	Sedikit	Sukarela	Konsultatif	Kooperatif

Sumber: Penulis, 2019

D. Pelembagaan

Upaya pelembagaan jejaring kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung No.663/Kep.459-Disperkintan/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung.

E. Aturan Main

Dalam aturan main maka berbicara mengenai kebiasaan yang ada pada pola

interaksi aktor-aktor di dalam jejaring kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung. Fragmentasi aktor terjadi pada pembahasan mengenai pengurangan kuota KPR FLPP yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kemen PUPR. Pengurangan kuota tersebut berpengaruh pada Kabupaten Bandung yang berdasarkan data dari APERSI Jawa Barat sisa stok rumah subsidi di Kabupaten Bandung hanya sebanyak 1.599 rumah. Dengan adanya pengurangan tersebut maka

mengancam pihak MBR tidak bisa memiliki rumah.

F. Hubungan Kekuasaan

Hubungan kekuasaan merupakan dimensi penting bagi jejaring kebijakan karena hubungan kekuasaan ada untuk menunjukkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Pembagian kekuasaan relatif seimbang di dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung. Baik aktor yang terlibat dalam Pokja PKP Kabupaten Bandung maupun aktor-aktor yang berada di luar Pokja PKP tersebut. Setiap dinas, lembaga non pemerintahan, akademisi, dan media massa memiliki porsi perannya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Tidak ada yang saling tumpang tindih pekerjaan dan tidak menyokong pekerjaan aktor lainnya apabila kedapatan ada yang tidak melaksanakan tugasnya.

G. Strategi Aktor

Strategi dalam jejaring kebijakan diperlukan untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan dengan melihat bagaimana respon dari aktor tersebut bertindak ketika menemui hambatan dan tantangan (Waarden, 1992:37). Strategi yang dilakukan antar aktor dalam mempengaruhi keputusan kebijakan dilakukan dalam forum diskusi atau rapat koordinasi dengan cara negosiasi, musyawarah atau audiensi. Contohnya, untuk mempengaruhi suatu kebijakan agar dapat sampai kepada bupati langsung serta kebijakan tersebut bisa diterapkan maka perlu dilakukan sebuah audiensi oleh Pokja PKP kepada Bupati Kabupaten Bandung secara langsung. Hal itu disebabkan karena, pendapat dan usulan kebijakan akan lebih efektif didengar dan dilaksanakan apabila yang menyampaikannya adalah aktor dari luar institusi pemerintahan seperti contohnya yaitu AKPPI.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya mengenai jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung, yang dianalisis melalui tujuh dimensi jejaring kebijakan yang dikemukakan oleh Frans Van Waarden, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jejaring

kebijakan pembangunan perumahan MBR di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya memenuhi ketujuh aspek tersebut. Selain itu, peran dari masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu sendiri kurang nampak dan tidak terlibat secara aktif dalam pelaksanaannya, dan Pokja PKP Kabupaten Bandung yang sudah ada saat ini belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan anggota dari Pokja PKP yang tersebar luas dari berbagai institusi sehingga peran dan informasi yang perlu dibagikan menjadi terhambat.

SARAN

Berdasarkan simpulan dan temuan yang telah dipaparkan di atas, penulis mengemukakan beberapa saran yaitu, kepada anggota Pokja PKP Kabupaten Bandung sebaiknya untuk mengagendakan jadwal pertemuan rutin minimal dua kali dalam satu bulan untuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh anggota yang terlibat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung sebaiknya membentuk Tim Koordinasi khusus yang melibatkan aktor dari pemerintah daerah, LSM, swasta, media massa, perbankan dan masyarakat serta membangun mekanisme kerja dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung yang mencakup aspek pembagian peran, dan tugas yang sesuai dengan kapasitas masing-masing aktor, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung sebaiknya mengelola secara sentralistik data mengenai perumahan MBR yang terbangun, jumlah eksisting MBR, dan jumlah rumah tidak layak huni yang dapat disinkronkan oleh semua aktor dan dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas secara transparan, dan yang terakhir kepada seluruh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung, sebaiknya memanfaatkan saluran informasi yang sudah ada pada saat ini dengan pemaparan materi melalui presentasi yang dikemas secara menarik dan rinci mengenai permasalahan yang ada dan dalam pelaksanaannya diharapkan untuk terbuka pada setiap pendapat kritik dan saran yang diajukan oleh setiap aktor jejaring.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. Widya Setiabudi Sumadinata, S.IP., S.Si.,MT.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
2. Bapak Dr. Wahyu Gunawan, M.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
3. Bapak Dr. Slamet Usman Ismanto, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S. selaku Dosen Pembimbing Pertama penulis. Terima kasih atas segala saran, arahan, kritikan maupun dukungan yang telah diberikan. Penulis memohon maaf apabila dalam masa bimbingan terdapat sikap maupun perilaku yang kurang berkenan. semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah bagi Bapak, dan dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.
5. Ibu Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis. Terima kasih atas segala saran, arahan, kritikan maupun dukungan yang telah diberikan. Penulis memohon maaf apabila dalam masa bimbingan terdapat sikap maupun perilaku yang kurang berkenan. semoga kebaikan yang Ibu berikan dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (21st ed)*. Bandung: Alfabeta
- West Java Province Metropolitan Development Management. (2012). Bandung: West Java Province Metropolitan

Development Management
(WJPMMDM).

B. JURNAL

- Waarden, F. V. (1992). *Dimensions and Types of Policy Network*. Konstanz: European Journal of Political Research.

C. WEBSITE

- <https://bandung.bisnis.com/read/20170717/549/1105704/javascript>
<https://www.beritasatu.com/hunian/192186-wika-realty-lanjutkan-pembangunan-dua-perumahan-sederhana.html>

D. DOKUMEN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung No.663/Kep.459-Disperkimtan/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung